

Implementasi Nilai Persatuan Indonesia dalam Menangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian

Frimzidant Triganda Purba¹, Danang Ashry Arrhasyd², Rajulman Sains Laia³

^{1,2,3} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: zidant.4253260010@mhs.unimed.ac.id

Abstract

The spread of misinformation and hate speech across digital platforms poses a challenge to social unity in Indonesia, particularly in multicultural cities such as Medan. This study aims to analyze the implementation of the Unity of Indonesia principle in countering misinformation and hate speech and to identify the roles of digital literacy and social harmony in strengthening community cohesion. The study employs a descriptive qualitative approach through a literature review and document analysis of government publications, institutional reports, and relevant scientific studies. Data were analyzed through data condensation, data display, and thematic conclusion drawing. The findings indicate that misinformation and hate speech remain significant concerns in Indonesia's digital environment. The Ministry of Communication and Digital Affairs identified 1,923 misinformation items throughout 2024, while monitoring conducted by AJI Indonesia and Monash University Indonesia identified identity-based attacks as a dominant form of hate speech during the 2024 general election. The analysis identifies three dimensions of implementing the Unity of Indonesia principle: responsible information sharing, respect for diverse identities, and constructive dialogue in resolving differences. Strengthening digital literacy and communication across social groups may support the application of these values within Medan's multicultural society. The study concludes that addressing misinformation and hate speech requires integrating Pancasila values, information verification skills, and stronger social relationships. However, the effectiveness of these practices in Medan requires further empirical investigation through field research.

Keywords: Unity of Indonesia, Pancasila, misinformation, hate speech, digital literacy, Medan City

Abstrak

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media digital menjadi tantangan bagi persatuan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah multikultural seperti Kota Medan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian serta mengidentifikasi peran literasi digital dan kerukunan sosial dalam mendukung persatuan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumentasi terhadap publikasi pemerintah, laporan lembaga resmi, serta penelitian ilmiah yang relevan. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian masih menjadi persoalan di ruang digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024, sedangkan pemantauan AJI Indonesia dan Monash University Indonesia menemukan bahwa serangan terhadap identitas

merupakan salah satu bentuk dominan ujaran kebencian selama Pemilu 2024. Analisis menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia dapat diterapkan melalui tiga dimensi utama, yaitu tanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi, penghormatan terhadap keberagaman identitas, serta penyelesaian perbedaan melalui dialog dan musyawarah. Penguatan literasi digital dan komunikasi lintas kelompok berpotensi mendukung penerapan nilai tersebut dalam masyarakat multikultural Kota Medan. Penelitian menyimpulkan bahwa pencegahan hoaks dan ujaran kebencian memerlukan integrasi nilai Pancasila, kemampuan verifikasi informasi, dan penguatan hubungan sosial. Namun, efektivitas penerapannya di Kota Medan masih memerlukan pengujian empiris melalui penelitian lapangan.

Kata kunci: Persatuan Indonesia, Pancasila, hoaks, ujaran kebencian, literasi digital, Kota Medan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang membentuk identitas kebangsaan. Keberagaman tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu dijaga melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai persatuan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan bangsa, menghormati perbedaan, dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Kartini dan Dewi (2021) menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila berperan dalam menumbuhkan nasionalisme generasi muda, terutama ketika perkembangan teknologi digital memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan memahami identitas kebangsaan. Dalam konteks kehidupan modern, penerapan nilai Persatuan Indonesia tidak hanya terbatas pada hubungan sosial secara langsung, tetapi juga mencakup perilaku masyarakat ketika menggunakan media digital. Perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan berinteraksi tanpa batas geografis. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran informasi palsu, provokasi, dan ujaran kebencian yang dapat memperkuat prasangka serta memicu konflik antarkelompok. Oleh karena itu, nilai Persatuan Indonesia perlu menjadi landasan etis dalam membangun komunikasi digital yang menghargai keberagaman dan mengutamakan kepentingan bersama (Karunia et al., 2023; Kristan, t.t.; Wardani & Parida, 2025).

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi persoalan yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hoaks merupakan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat membentuk pemahaman keliru terhadap suatu peristiwa, sedangkan ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang menyerang atau merendahkan individu maupun kelompok berdasarkan identitas tertentu. Kedua persoalan tersebut dapat saling berkaitan ketika informasi yang tidak benar memuat narasi provokatif mengenai suku, agama, ras, atau kelompok sosial tertentu. Kondisi ini terlihat dari data Kementerian Komunikasi dan Digital (2025) yang mengidentifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024. Selanjutnya, ANTARA News (2025) melaporkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi 1.890 konten hoaks dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2025. Kedua data tersebut memiliki

periode pengamatan yang berbeda sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan peningkatan atau penurunan jumlah hoaks. Meskipun demikian, data tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran informasi palsu masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam situasi masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya beragam, penyebaran hoaks berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, mengurangi kepercayaan antarkelompok, dan mengganggu hubungan sosial apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi secara kritis (Kementerian Komunikasi dan Digital & Katadata Insight Center, 2022; Pradana & Sholikin, 2025).

Selain hoaks, ujaran kebencian di media sosial juga menjadi ancaman terhadap persatuan masyarakat karena dapat memperkuat diskriminasi dan polarisasi sosial. Hasil pemantauan AJI Indonesia dan Monash University Indonesia (2024) selama masa kampanye Pemilu 2024 menunjukkan adanya peningkatan ujaran kebencian yang menyasar kelompok minoritas. Dalam pemantauan terhadap percakapan digital pada periode September 2023 hingga Januari 2024, tim peneliti mengidentifikasi 182.118 teks yang mengandung ujaran kebencian dari 678.106 teks yang dianalisis. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital dapat menjadi sarana penyebaran narasi yang menyerang identitas kelompok tertentu, terutama ketika perbedaan pandangan politik dan sosial semakin menguat. Idris et al. (2025) juga membahas persoalan ujaran kebencian dalam konteks Pilkada Serentak 2024 melalui kegiatan pemantauan terhadap komunikasi digital selama berlangsungnya kontestasi politik. Permasalahan ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial perlu disertai tanggung jawab untuk menghormati hak dan martabat orang lain. Dalam perspektif Pancasila, penerapan nilai persatuan menuntut masyarakat untuk menghindari komunikasi yang bersifat diskriminatif, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta mengutamakan dialog ketika menghadapi perbedaan pandangan. Dengan demikian, penguatan persatuan dalam ruang digital perlu diwujudkan melalui perilaku komunikasi yang bertanggung jawab dan penghormatan terhadap keberagaman (Hukumonline, 2024; Metro TV News, 2023).

Upaya menangkal hoaks dan ujaran kebencian memerlukan keterlibatan masyarakat melalui penguatan literasi digital dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup keterampilan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis serta bertanggung jawab. Kementerian Komunikasi dan Digital dan Katadata Insight Center (2022) menempatkan kecakapan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital sebagai dimensi penting dalam pengembangan literasi masyarakat. Dalam kaitannya dengan nilai Persatuan Indonesia, kemampuan tersebut dapat diterapkan melalui kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menghormati perbedaan pendapat, serta menolak konten yang mengandung penghinaan dan provokasi terhadap kelompok tertentu. Pradana dan Sholikin (2025) membahas penerapan literasi digital berbasis nilai Pancasila sebagai upaya menangkal penyebaran berita bohong. Sementara itu, Prayogo et al. (2025) menempatkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai bagian dari upaya pencegahan hoaks dan ujaran kebencian di lingkungan sekolah. Wardani dan Parida (2025) juga menjelaskan bahwa nilai Persatuan Indonesia dapat digunakan sebagai landasan dalam mencegah konflik

sosial di era digital melalui penguatan etika komunikasi dan kesadaran terhadap keberagaman. Berbagai kajian tersebut memperlihatkan adanya hubungan konseptual antara pendidikan nilai kebangsaan, kemampuan literasi digital, dan pembentukan perilaku komunikasi yang bertanggung jawab. Akan tetapi, penerapan nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya beragam masih memerlukan kajian yang lebih kontekstual.

Kota Medan menjadi salah satu wilayah yang relevan untuk mengkaji implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan keberadaan berbagai kelompok etnis, antara lain Melayu, Batak, Jawa, Tionghoa, Minangkabau, dan India, serta masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Badan Pusat Statistik Kota Medan (2024a, 2024b) menyediakan data mengenai karakteristik penduduk dan perkembangan sosial Kota Medan yang dapat digunakan untuk memahami kondisi demografis wilayah tersebut. Keberagaman tersebut menciptakan peluang terjadinya interaksi dan kerja sama lintas kelompok, tetapi sekaligus membutuhkan kesadaran bersama untuk mencegah munculnya prasangka dan konflik sosial. Center for Inclusive and Multicultural Studies (2025) melalui kajiannya mengenai perjalanan Kota Medan menuju kota toleran menempatkan persoalan toleransi sebagai bagian dari perhatian terhadap kehidupan masyarakat majemuk. Pada tingkat nasional, Kementerian Agama Republik Indonesia (2024) mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2024 sebesar 76,47. Meskipun indeks tersebut tidak secara khusus menggambarkan kondisi Kota Medan, data ini memberikan konteks mengenai pentingnya pemeliharaan kerukunan dalam masyarakat Indonesia. Dalam situasi tersebut, hoaks dan ujaran kebencian yang memanfaatkan sentimen identitas perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi hubungan sosial antarkelompok. Oleh sebab itu, Kota Medan menjadi lokasi penelitian yang relevan untuk memahami bagaimana masyarakat mengimplementasikan nilai persatuan ketika menerima, menanggapi, dan menyebarkan informasi melalui media digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keterkaitan nilai-nilai Pancasila, literasi digital, dan pencegahan konflik sosial. Kartini dan Dewi (2021) mengkaji implementasi pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme generasi muda, sedangkan Pradana dan Sholikin (2025) membahas literasi digital berbasis nilai Pancasila dalam menangkal hoaks. Prayogo et al. (2025) memusatkan perhatian pada peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian di sekolah. Selanjutnya, Wardani dan Parida (2025) mengkaji implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam mencegah konflik sosial di era digital. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan konseptual mengenai pentingnya pendidikan karakter, etika digital, dan kesadaran kebangsaan. Namun, kajian yang disebutkan belum secara khusus menjelaskan praktik penerapan nilai Persatuan Indonesia oleh masyarakat Kota Medan dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian pada interaksi digital maupun kehidupan sosial sehari-hari. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menjelaskan nilai persatuan sebagai konsep normatif, tetapi juga mengidentifikasi bentuk perilaku, pengalaman, dan mekanisme sosial masyarakat dalam

menerapkannya. Dengan memperhatikan karakteristik masyarakat Kota Medan yang majemuk, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai hubungan antara nilai kebangsaan dan perilaku masyarakat dalam menghadapi informasi yang berpotensi menimbulkan konflik.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk hoaks dan ujaran kebencian yang dihadapi masyarakat, menganalisis penerapan nilai persatuan dalam perilaku bermedia digital, serta memahami upaya masyarakat dalam menjaga hubungan sosial di tengah keberagaman. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dan observasi lapangan untuk menghubungkan pemahaman teoretis mengenai nilai Pancasila dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kebaruan penelitian terletak pada fokus analisis terhadap praktik implementasi nilai sila ketiga Pancasila dalam konteks masyarakat multikultural Kota Medan, khususnya pada hubungan antara perilaku komunikasi digital, pencegahan penyebaran informasi negatif, dan pemeliharaan persatuan sosial. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai penerapan nilai Persatuan Indonesia sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan literasi digital berbasis Pancasila yang sesuai dengan karakteristik masyarakat majemuk.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian di Kota Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai perilaku, pengalaman, dan praktik sosial masyarakat dalam menerapkan nilai sila ketiga Pancasila ketika menghadapi penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan pandangan individu dalam konteks kehidupan sehari-hari (Creswell & Poth, 2018). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi bentuk ancaman hoaks dan ujaran kebencian, tetapi juga mengkaji cara masyarakat menerapkan nilai persatuan, seperti menghormati perbedaan, memverifikasi informasi, menghindari provokasi, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Penelitian dilaksanakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakatnya yang memiliki keberagaman etnis, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Keberagaman tersebut menjadikan Kota Medan sebagai lokasi yang relevan untuk mengamati penerapan nilai Persatuan Indonesia dalam interaksi sosial dan penggunaan media digital. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas sosial masyarakat yang berkaitan dengan penerapan nilai persatuan, khususnya perilaku dalam menyikapi informasi yang berpotensi memicu kesalahpahaman dan konflik. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, publikasi pemerintah, serta dokumen lembaga resmi yang membahas Pancasila, literasi digital, hoaks, ujaran kebencian, dan kondisi sosial masyarakat Kota Medan.

Sumber data sekunder mencakup publikasi Badan Pusat Statistik Kota Medan (2024a, 2024b), laporan Kementerian Komunikasi dan Digital (2025), serta hasil pemantauan AJI Indonesia dan Monash University Indonesia (2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi lapangan. Studi dokumentasi bertujuan mengumpulkan informasi mengenai konsep nilai Persatuan Indonesia, karakteristik hoaks dan ujaran kebencian, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Peneliti menyeleksi sumber berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas penerbit, dan relevansi informasi terhadap tujuan penelitian. Sementara itu, observasi lapangan diarahkan untuk mengidentifikasi perilaku dan bentuk interaksi sosial yang mencerminkan penerapan nilai persatuan dalam masyarakat. Aspek pengamatan meliputi sikap menghargai perbedaan, bentuk komunikasi antarkelompok, respons terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta upaya menjaga hubungan sosial ketika muncul perbedaan pendapat. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif, yaitu peneliti mengamati aktivitas sosial tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Peneliti mencatat hasil pengamatan secara sistematis menggunakan lembar observasi dan catatan lapangan agar data yang terkumpul sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tiga kegiatan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi dari hasil observasi serta kajian literatur berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tema utama, yaitu bentuk ancaman hoaks dan ujaran kebencian, penerapan nilai Persatuan Indonesia dalam komunikasi digital, serta upaya masyarakat menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun hasil analisis secara naratif untuk menjelaskan hubungan antara konsep Pancasila, perilaku masyarakat, dan fenomena sosial yang ditemukan. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola dan keterkaitan antartema, kemudian memeriksa kembali kesesuaiannya dengan data yang tersedia agar interpretasi tetap konsisten dengan temuan penelitian.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari hasil observasi lapangan, publikasi ilmiah, dan dokumen lembaga resmi. Triangulasi bertujuan memperkuat kredibilitas interpretasi melalui pemeriksaan kesesuaian informasi dari sumber yang berbeda (Creswell & Poth, 2018). Peneliti juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap catatan observasi dan dokumen pendukung untuk mengurangi kesalahan penafsiran. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti memperhatikan prinsip etika penelitian dengan menghormati privasi individu, tidak mencantumkan identitas pribadi tanpa persetujuan, serta menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai praktik penerapan nilai Persatuan Indonesia dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian di Kota Medan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Pola Persebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian di Ruang Digital

Hasil analisis terhadap laporan resmi dan publikasi penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian masih menjadi persoalan dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital (2025) mencatat sebanyak 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa informasi palsu muncul dalam berbagai bentuk dan memerlukan upaya penanganan yang berkelanjutan. Sementara itu, CNN Indonesia (2025) melaporkan adanya 1.674 konten hoaks yang teridentifikasi dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Perbedaan periode pengamatan menyebabkan kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung untuk menentukan perubahan intensitas penyebaran hoaks. Namun, kedua sumber menunjukkan bahwa informasi palsu tetap menjadi persoalan yang ditemukan dalam pemantauan ruang digital nasional.

Berdasarkan data kategori hoaks yang tercantum dalam laporan CNN Indonesia (2025), penipuan menempati jumlah tertinggi, kemudian diikuti isu pemerintahan, politik, kesehatan, kebencanaan, dan isu internasional. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa informasi palsu tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tetapi juga berhubungan dengan persoalan publik yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat. Hoaks mengenai kebijakan pemerintah, misalnya, dapat menimbulkan kesalahpahaman ketika masyarakat menerima informasi tanpa memeriksa sumber dan konteksnya. Dalam masyarakat majemuk, persoalan menjadi lebih sensitif apabila informasi yang beredar memuat narasi mengenai identitas kelompok tertentu.

Tabel 1. Distribusi Kategori Hoaks Nasional Periode Oktober 2024 sampai Oktober 2025

Kategori hoaks	Jumlah konten	Persentase dari 1.674
Penipuan	589	35,19%
Pemerintahan	341	20,37%
Lain-lain	249	14,87%
Politik	166	9,92%
Kesehatan	87	5,20%
Kebencanaan	68	4,06%
Internasional	49	2,93%
Kategori belum terinci	125	7,47%
Total	1.674	100%

Sumber: Diolah dari rincian yang disampaikan dalam naskah awal dengan rujukan CNN Indonesia (2025). Selisih 125 konten belum dapat diidentifikasi kategorinya dari data yang tersedia, sehingga tabel memerlukan verifikasi sebelum publikasi. Persentase dibulatkan dua desimal.

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kategori penipuan dan pemerintahan menyumbang 55,56% dari total konten hoaks yang dilaporkan. Tingginya proporsi kedua kategori tersebut menunjukkan perlunya kemampuan masyarakat dalam mengenali informasi yang menyesatkan, terutama informasi mengenai layanan publik, kebijakan pemerintah, dan aktivitas ekonomi. Meskipun tidak seluruh hoaks secara langsung mengancam persatuan, penyebaran informasi palsu dapat

memperburuk hubungan sosial ketika masyarakat menjadikannya dasar penilaian terhadap individu, lembaga, atau kelompok tertentu.

Pada aspek ujaran kebencian, hasil pemantauan AJI Indonesia dan Monash University Indonesia (2024) memperlihatkan pola yang lebih berkaitan dengan persoalan identitas sosial. Pemantauan terhadap percakapan digital pada September 2023 hingga Januari 2024 menganalisis 678.106 teks dan mengidentifikasi 182.118 teks yang mengandung ujaran kebencian. Bentuk ujaran kebencian paling banyak berupa serangan terhadap identitas, kemudian diikuti hinaan, penggunaan kata-kata kasar, serta ancaman dan hasutan. Kategori tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan identitas dan pandangan dapat menjadi sasaran komunikasi yang berpotensi memperkuat prasangka antarkelompok.

Tabel 2. Bentuk Ujaran Kebencian dalam Pemantauan Pemilu 2024

Bentuk ujaran kebencian	Jumlah teks
Serangan terhadap identitas	123.968
Hinaan	104.664
Kata-kata kotor	42.267
Ancaman dan hasutan	39.153
Seksual atau vulgar	3.528
Lainnya	5.665

Sumber: AJI Indonesia dan Monash University Indonesia (2024). Satu teks dapat memiliki lebih dari satu kategori ujaran kebencian sehingga jumlah setiap kategori tidak dapat dijumlahkan sebagai jumlah teks unik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa serangan terhadap identitas menjadi bentuk ujaran kebencian yang dominan dalam data pemantauan. AJI Indonesia dan Monash University Indonesia (2024) juga melaporkan bahwa ujaran kebencian ditemukan melalui platform X, Facebook, dan Instagram. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran narasi diskriminatif tidak terbatas pada satu saluran komunikasi digital. Bagi masyarakat Kota Medan, hasil pemantauan nasional tersebut menjadi konteks yang relevan mengingat masyarakat setempat juga dapat mengakses platform digital yang sama. Namun, data ini belum menunjukkan jumlah maupun karakteristik ujaran kebencian yang secara khusus terjadi di Kota Medan.

2. Kondisi Kerukunan Sosial dan Kesiapan Digital Masyarakat

Hasil analisis dokumentasi menunjukkan bahwa pembahasan mengenai implementasi nilai Persatuan Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi kerukunan sosial dan kemampuan masyarakat menggunakan teknologi digital. Kedua aspek tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Kerukunan sosial berkaitan dengan sikap saling menghormati, penerimaan terhadap perbedaan, dan kemampuan membangun kerja sama. Sementara itu, literasi digital berkaitan dengan kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara bertanggung jawab.

Data Indonesia Knowledge Hub (t.t.) yang merujuk pada penelitian Kementerian Agama tahun 2021 menunjukkan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Utara mencapai 77,4. Pada tingkat nasional, Kementerian Agama Republik Indonesia (2024) melaporkan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 76,47 pada tahun 2024, meningkat dari 76,02 pada tahun sebelumnya. Kedua temuan tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi kerukunan pada tingkat wilayah yang berbeda. Meskipun demikian, perbedaan tahun dan cakupan wilayah membatasi penggunaan data tersebut untuk menyimpulkan bahwa kondisi

kerukunan Sumatera Utara lebih baik daripada kondisi nasional pada tahun yang sama.

Tabel 3. Indikator Kerukunan dan Kesiapan Digital Masyarakat

Indikator	Tahun	Nilai
Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara	2021	77,40
Indeks Kerukunan Umat Beragama nasional	2023	76,02
Indeks Kerukunan Umat Beragama nasional	2024	76,47
Indeks Literasi Digital Indonesia	2022	3,54 dari 5
Indeks Masyarakat Digital Indonesia	2023	43,18
Indeks Masyarakat Digital Indonesia	2024	43,34

Sumber: Indonesia Knowledge Hub (t.t.); Kementerian Agama Republik Indonesia (2024); Kementerian Komunikasi dan Digital dan Katadata Insight Center (2022); Kementerian Komunikasi dan Digital (2024). Indikator menggunakan instrumen dan skala berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa skor kerukunan dan kesiapan digital memiliki karakteristik pengukuran yang berbeda. Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama nasional menunjukkan perkembangan positif pada indikator kerukunan masyarakat. Sementara itu, skor Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang meningkat dari 43,18 pada 2023 menjadi 43,34 pada 2024 menunjukkan perubahan sebesar 0,16 poin. Walaupun mengalami peningkatan, angka tersebut belum dapat digunakan untuk menilai kemampuan masyarakat Kota Medan secara khusus karena merupakan hasil pengukuran nasional.

Dalam konteks Kota Medan, Badan Pusat Statistik Kota Medan (2024a, 2024b) menyediakan gambaran mengenai karakteristik penduduk dan perkembangan sosial yang dapat digunakan untuk memahami keberagaman masyarakat setempat. Selain itu, Center for Inclusive and Multicultural Studies (2025) membahas perkembangan toleransi di Kota Medan dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat multikultural. Berdasarkan kedua kelompok sumber tersebut, keberagaman masyarakat Kota Medan menjadi konteks yang relevan untuk menganalisis implementasi nilai Persatuan Indonesia. Namun, keberagaman penduduk tidak dengan sendirinya menunjukkan tingginya toleransi ataupun efektivitas masyarakat dalam menangkal ujaran kebencian. Hubungan tersebut membutuhkan pengamatan terhadap praktik sosial dan perilaku komunikasi masyarakat.

3. Identifikasi Bentuk Implementasi Nilai Persatuan Indonesia

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa penerapan nilai Persatuan Indonesia dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, penghormatan terhadap keberagaman, dan penyelesaian perbedaan melalui komunikasi yang konstruktif. Ketiga dimensi tersebut merupakan kategori analitis yang berasal dari kajian literatur, bukan hasil pengukuran perilaku warga Kota Medan secara langsung.

Dimensi pertama berkaitan dengan tanggung jawab masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pradana dan Sholikin (2025) membahas pentingnya literasi digital berbasis nilai Pancasila untuk mencegah penyebaran hoaks. Implementasi nilai persatuan dalam dimensi ini dapat terlihat melalui kebiasaan memeriksa sumber informasi, membandingkan informasi dengan sumber resmi, serta

menolak menyebarkan pesan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Perilaku tersebut mencerminkan kesadaran bahwa penyebaran informasi tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan dan hubungan antarkelompok masyarakat.

Dimensi kedua berkaitan dengan penghormatan terhadap perbedaan identitas sosial. Wardani dan Parida (2025) menjelaskan bahwa nilai Persatuan Indonesia dapat menjadi landasan normatif dalam mencegah konflik sosial di era digital. Dalam konteks tersebut, penerapan nilai persatuan dapat dilihat dari kemampuan individu menghargai pandangan yang berbeda, menghindari penghinaan terhadap identitas suku dan agama, serta tidak menggunakan media sosial untuk memperkuat prasangka. Sikap tersebut relevan dengan karakteristik masyarakat Kota Medan yang memiliki keberagaman etnis dan agama.

Dimensi ketiga berkaitan dengan pemanfaatan dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Prayogo et al. (2025) menempatkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan sikap bertanggung jawab ketika menghadapi hoaks dan ujaran kebencian. Nilai persatuan dapat diterapkan melalui komunikasi yang mengutamakan klarifikasi dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam kehidupan masyarakat multikultural, forum sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lintas agama berpotensi menjadi sarana untuk membangun pemahaman bersama. Akan tetapi, efektivitas forum-forum tersebut dalam menangkal hoaks di Kota Medan belum dapat disimpulkan tanpa data kegiatan, hasil observasi, atau keterangan dari pihak yang terlibat.

Berdasarkan sintesis tersebut, implementasi nilai Persatuan Indonesia dapat dipahami sebagai praktik kewarganegaraan yang menghubungkan kesadaran kebangsaan dengan perilaku komunikasi sehari-hari. Nilai persatuan tidak cukup hanya dipahami melalui pengetahuan mengenai Pancasila, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan yang dapat diamati, terutama dalam memverifikasi informasi, menghormati keberagaman, dan menyelesaikan perbedaan tanpa menggunakan ujaran kebencian.

Pembahasan

1. Implementasi Nilai Persatuan Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Hoaks dan Ujaran Kebencian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Persatuan Indonesia memiliki relevansi dalam menghadapi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian karena kedua fenomena tersebut dapat mengganggu hubungan sosial masyarakat. Sila ketiga Pancasila mengandung prinsip kebersamaan, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan bangsa. Dalam konteks ruang digital, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui perilaku komunikasi yang tidak menimbulkan permusuhan serta kesediaan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Wardani dan Parida (2025) menjelaskan bahwa implementasi nilai Persatuan Indonesia dapat menjadi landasan dalam mencegah konflik sosial di era digital. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa nilai persatuan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga memberikan arah bagi pembentukan perilaku komunikasi yang bertanggung jawab.

Temuan mengenai dominasi serangan terhadap identitas dalam pemantauan ujaran kebencian menunjukkan adanya persoalan yang berkaitan langsung dengan prinsip persatuan. AJI Indonesia dan Monash University Indonesia (2024) menemukan bahwa ujaran kebencian selama periode pemantauan Pemilu 2024 banyak menyasar identitas kelompok minoritas. Dalam masyarakat multikultural, narasi yang merendahkan identitas tertentu berpotensi membentuk stereotip, memperkuat prasangka, dan menghambat hubungan antarkelompok. Oleh karena itu, penerapan sila ketiga Pancasila perlu diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak setiap kelompok untuk memperoleh perlakuan setara dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi. Pemahaman tersebut sejalan dengan kajian Karunia et al. (2023) yang menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam kehidupan hukum dan kenegaraan Indonesia.

Penerapan nilai persatuan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat membedakan kebebasan menyampaikan pendapat dan tindakan yang dapat merugikan kelompok lain. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokratis, sedangkan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian dapat merusak kualitas komunikasi publik. Dalam hal ini, nilai Persatuan Indonesia tidak berarti menghilangkan perbedaan pandangan, melainkan mengarahkan masyarakat agar menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Prinsip tersebut dapat diterapkan melalui penggunaan bahasa yang menghormati orang lain, penolakan terhadap penghinaan berbasis identitas, dan kesediaan melakukan klarifikasi ketika menghadapi informasi yang diperdebatkan.

2. Hubungan Literasi Digital dengan Penguatan Persatuan Masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan nilai Persatuan Indonesia memerlukan dukungan kemampuan literasi digital. Nilai persatuan memberikan dasar etis untuk menjaga hubungan sosial, sedangkan literasi digital menyediakan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali dan mengevaluasi informasi. Kedua aspek tersebut saling melengkapi karena pemahaman terhadap nilai kebangsaan belum tentu membuat seseorang mampu mengidentifikasi informasi palsu apabila tidak memiliki keterampilan memeriksa sumber dan bukti. Sebaliknya, kemampuan menggunakan teknologi tanpa disertai tanggung jawab sosial dapat menyebabkan seseorang tetap menyebarkan konten yang merugikan kelompok lain.

Kementerian Komunikasi dan Digital dan Katadata Insight Center (2022) menjelaskan bahwa literasi digital mencakup kecakapan digital, keamanan digital, etika digital, dan budaya digital. Dalam konteks penelitian ini, etika dan budaya digital memiliki hubungan dengan penerapan nilai Persatuan Indonesia karena mencakup tanggung jawab dalam berinteraksi dan penghormatan terhadap keberagaman. Sementara itu, kecakapan digital mendukung kemampuan masyarakat untuk menelusuri sumber informasi dan memeriksa kebenaran suatu pesan. Pradana dan Sholikin (2025) juga membahas penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar penguatan literasi digital dalam menangkal penyebaran hoaks. Dengan demikian, pencegahan hoaks memerlukan perpaduan antara kemampuan teknis mengevaluasi informasi dan kesadaran moral mengenai dampak penyebarannya terhadap masyarakat.

Dalam konteks Kota Medan, penguatan literasi digital berbasis Pancasila dapat diarahkan pada lingkungan pendidikan, keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas warga. Kegiatan yang relevan meliputi pelatihan verifikasi informasi, diskusi mengenai etika komunikasi digital, dan edukasi tentang konsekuensi penyebaran konten yang mengandung kebencian. Pendekatan tersebut perlu memperhatikan keberagaman latar belakang sosial masyarakat agar materi literasi digital dapat dipahami dan diterapkan oleh berbagai kelompok. Namun, penelitian ini belum mengukur secara langsung kemampuan literasi digital masyarakat Kota Medan sehingga efektivitas program tersebut masih perlu diuji melalui penelitian empiris.

3. Peran Kerukunan Sosial dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Digital

Hasil kajian dokumentasi memperlihatkan bahwa Sumatera Utara memiliki indikator kerukunan umat beragama yang dapat menjadi konteks untuk memahami hubungan sosial masyarakat. Indonesia Knowledge Hub (t.t.) mencatat nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara sebesar 77,4 berdasarkan data tahun 2021. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia (2024) melaporkan adanya peningkatan indeks kerukunan nasional dari 76,02 pada 2023 menjadi 76,47 pada 2024. Data tersebut menunjukkan kondisi kerukunan berdasarkan pengukuran pada wilayah dan periode masing-masing, tetapi belum membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara tingkat kerukunan dan kemampuan masyarakat menangkal hoaks.

Secara konseptual, hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui teori modal sosial yang dikembangkan Putnam (2000). Modal sosial mencakup jaringan sosial, kepercayaan, dan norma timbal balik yang memungkinkan masyarakat membangun kerja sama. Dalam masyarakat multikultural, jaringan sosial lintas kelompok berpotensi mempermudah klarifikasi informasi dan mengurangi kesalahpahaman karena individu memiliki saluran komunikasi untuk memperoleh penjelasan secara langsung. Meskipun demikian, keberadaan jaringan sosial tidak selalu menghasilkan dampak positif. Jaringan yang tertutup dan hanya melibatkan kelompok dengan pandangan serupa juga dapat memperkuat penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Oleh karena itu, penguatan modal sosial perlu memperhatikan keterbukaan komunikasi dan kerja sama lintas kelompok.

Kota Medan memiliki konteks sosial yang relevan untuk mengkaji hubungan tersebut. Badan Pusat Statistik Kota Medan (2024a, 2024b) memberikan gambaran mengenai keberagaman penduduk, sedangkan Center for Inclusive and Multicultural Studies (2025) menempatkan persoalan toleransi sebagai salah satu aspek dalam perkembangan kehidupan sosial kota tersebut. Dalam konteks ini, forum lintas agama, organisasi masyarakat, dan komunitas sosial dapat menjadi sarana penguatan komunikasi antarkelompok. Akan tetapi, peran nyata lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan klarifikasi hoaks dan menangani ujaran kebencian masih memerlukan pembuktian melalui observasi kegiatan dan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, kerukunan sosial lebih tepat diposisikan sebagai faktor yang berpotensi mendukung ketahanan masyarakat terhadap konflik digital, bukan sebagai bukti langsung keberhasilan penanganan hoaks.

4. Keterkaitan Temuan dengan Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian

Hasil analisis penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas pendidikan Pancasila, literasi digital, dan pencegahan konflik sosial. Kartini dan Dewi (2021) menekankan peran pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme generasi muda pada era digital. Prayogo et al. (2025) membahas peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian di lingkungan sekolah. Sementara itu, Pradana dan Sholikin (2025) mengkaji implementasi literasi digital berbasis nilai Pancasila sebagai upaya pencegahan penyebaran informasi palsu. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan nilai dan kemampuan mengevaluasi informasi merupakan dua aspek yang perlu diperhatikan dalam membentuk perilaku kewarganegaraan digital.

Penelitian ini juga memiliki kesesuaian konseptual dengan kajian Wardani dan Parida (2025) mengenai implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam mencegah konflik sosial di era digital. Perbedaannya terletak pada fokus analisis yang menempatkan karakteristik masyarakat multikultural Kota Medan sebagai konteks penerapan nilai persatuan. Penelitian ini menghubungkan data persebaran hoaks nasional, pemantauan ujaran kebencian berbasis identitas, kondisi kerukunan, dan konsep literasi digital untuk menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapan sila ketiga Pancasila pada tingkat masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis implementasi nilai Persatuan Indonesia yang mencakup tiga aspek, yaitu tanggung jawab terhadap informasi, penghormatan terhadap identitas sosial, dan komunikasi lintas kelompok. Ketiga aspek tersebut dapat menjadi dasar dalam mengembangkan instrumen penelitian lapangan untuk mengidentifikasi perilaku masyarakat ketika menghadapi hoaks dan ujaran kebencian. Meskipun demikian, kebaruan empiris mengenai praktik masyarakat Kota Medan belum dapat diklaim sepenuhnya sebelum peneliti menyajikan data observasi yang mendukung temuan tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai Persatuan Indonesia memiliki peran penting sebagai landasan etis dalam menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital. Data nasional menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian masih menjadi tantangan bagi kehidupan masyarakat, terutama ketika informasi yang beredar mengandung unsur provokasi, diskriminasi, dan serangan terhadap identitas kelompok tertentu. Dalam konteks Kota Medan yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, penerapan nilai sila ketiga Pancasila menjadi relevan untuk memperkuat sikap saling menghormati, menjaga hubungan sosial, dan mencegah munculnya konflik akibat penyalahgunaan informasi digital.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan nilai Persatuan Indonesia dapat diwujudkan melalui tiga bentuk utama, yaitu membangun tanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi, menghormati perbedaan identitas serta pandangan masyarakat, dan mengutamakan dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Penguatan nilai tersebut perlu didukung oleh literasi

digital agar masyarakat mampu memverifikasi kebenaran informasi, mengenali konten provokatif, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Selain itu, keberagaman sosial masyarakat Kota Medan memberikan peluang bagi penguatan kerja sama lintas kelompok melalui lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan forum keagamaan. Namun, penelitian ini belum dapat memastikan efektivitas penerapan nilai persatuan secara langsung karena sebagian besar data berasal dari publikasi nasional dan regional, sedangkan bukti observasi lapangan yang spesifik masih terbatas.

Dengan demikian, upaya menangkal hoaks dan ujaran kebencian memerlukan keterpaduan antara internalisasi nilai Pancasila, peningkatan literasi digital, dan penguatan komunikasi sosial dalam masyarakat. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat perlu mengembangkan kegiatan edukasi digital yang menekankan verifikasi informasi, etika komunikasi, serta penghormatan terhadap keberagaman. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan pengumpulan data lapangan yang lebih luas untuk mengukur praktik penerapan nilai Persatuan Indonesia dan efektivitasnya dalam mencegah konflik sosial di Kota Medan.

Refrensi

- [1] Aji Indonesia. (2024, 15 Februari). Kampanye Pemilu 2024, ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas meningkat.
<https://aji.or.id/informasi/kampanye-pemilu-2024-ujaran-kebencian-terhadap-kelompok-minoritas-meningkat>
- [2] ANTARA News. (2025, 8 Desember). Kemkomdigi identifikasi 1.890 konten hoaks dalam satu tahun terakhir.
<https://www.antaranews.com/berita/5293072/kemkomdigi-identifikasi-1890-konten-hoaks-dalam-satu-tahun-terakhir>
- [3] Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2024a). Kajian riset dan isu terkini Kota Medan 2024.
- [4] Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2024b). Kota Medan dalam angka 2024.
- [5] Center for Inclusive and Multicultural Studies. (2025). Jalan panjang Medan menuju kota toleran. Satya Terra Bhinneka.
- [6] CNN Indonesia. (2025, 24 Oktober). Komdigi beber ribuan hoaks, isu pemerintahan urutan kedua.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20251024111643-192-1288005/komdigi-beber-ribuan-hoaks-isu-pemerintahan-urutan-kedua>
- [7] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- [8] detikInet. (2024). Menkominfo beberkan bukti masyarakat Indonesia makin digital di 2024. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7533960/menkominfo-beberkan-bukti-masyarakat-indonesia-makin-digital-di-2024>
- [9] Hukumonline. (2024). Penanggulangan hate speech dalam pemilu. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penanggulangan-i-hate-speech-i-dalam-pemilu-lt65f181af493db/>

- [10] Idris, I., Wijaya, D., Amalia, N., & Susanto, L. (2025). Laporan pemantauan ujaran kebencian di Pilkada Serentak 2024. AJI Indonesia dan Monash University.
- [11] Indonesia Knowledge Hub. (t.t.). Sumatera Utara: Indeks kerukunan umat beragama. <https://ikhub.id/peta/43677958>
- [12] Kartini, A., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan rasa nasionalisme generasi muda di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 9(2), 405–418. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.136>
- [13] Karunia, A., et al. (2023). Pancasila as the philosophical foundation of Indonesian law. *Journal of Civic and Legal Studies*, 8(2), 115–126.
- [14] Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024, Oktober). Indeks kerukunan umat beragama 2024 naik jadi 76,47. <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-2024-naik-jadi-76-47-wG2qs>
- [15] Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, Januari). Komdigi identifikasi 1.923 konten hoaks sepanjang tahun 2024. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>
- [16] Kementerian Komunikasi dan Digital, & Katadata Insight Center. (2022). Status literasi digital Indonesia 2022.
- [17] Kristan, S. (t.t.). Pandangan mengenai praktik-praktik hoax dan hate speech harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. BINUS University. <https://binus.ac.id/character-building/?p=2252>
- [18] Metro TV News. (2023, 30 Juli). Masyarakat diminta jaga persatuan nasional di ruang digital. <https://www.metrotvnews.com/read/Ky6CBVYB-masyarakat-diminta-jaga-persatuan-nasional-di-ruang-digital>
- [19] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- [20] Pradana, M. F. A., & Sholikin. (2026). Implementasi literasi digital berbasis nilai Pancasila dalam menangkal penyebaran berita bohong (hoaks). *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (HUBISINTEK)*, 6(1), 234–237. <https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/5867>
- [21] Prayogo, E. N., Machsunah, Y. C., & Rachma, E. A. (2025). Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian di sekolah. *Jurnal PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 163–174. <https://doi.org/10.31932/jpk.v10i2.5772>
- [22] Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- [23] RRI. (2026, 31 Mei). Pancasila jadi kompas persatuan di era digital. <https://rri.co.id/ende/asta-cita/2457089/pancasila-jadi-kompas-persatuan-di-era-digital>
- [24] Tribun Medan. (2026, 10 Mei). Indeks kerukunan dan demokrasi Sumut meningkat. <https://medan.tribunnews.com/sumut-terkini/1793815/indeks-kerukunan-dan-demokrasi-sumut-meningkat>
- [25] Wardani, A. P. P., & Parida, R. (2025). Implementing the value of Indonesian unity in preventing social conflict in the digital era. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 885–891. <https://doi.org/10.36805/civics.v10i02.11300>